

**JURNAL**  
**PERAN POLISI DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN PELACURAN DI KOTA**  
**YOGYAKARTA**



**Disusun Oleh:**  
**EDWARD DENY DWI HANDOYO**

**NPM** : **050509123**  
**Program Studi** : **Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan** : **Peradilan dan Penyelesaian**  
**Sengketa Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**JURNAL**

**PERAN POLISI DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN PELACURAN DI  
KOTA YOGYAKARTA**



**Disusun oleh:**

**EDWARD DENY DWI HANDOYO**

**NPM : 050509123**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum**

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing**

**Pada tanggal 18/6 2015**

**Dosen Pembimbing I**

**(Dr.G. Widhiartana, SH., M.Hum)**

## **JURNAL**

### **PERAN POLISI DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN PELACURAN DI KOTA YOGYAKARTA**

#### **A. Abstract**

The existence of prostitutes is a logical consequence of the development of the city. The existence of prostitutes in Indonesia are increasing and disturbing public order. Police are expected to curb prostitutes. This prompted the researchers to conduct research about police role for implementation of the controlling prostitution in Yogyakarta. The problem in this research is how the role of the police in carrying out policing prostitution in the city of Yogyakarta and any constraints facing the police in the curb prostitution. This type of research is a kind of empirical legal research. The data source consists of primary data and secondary data. The data collected through interviews with relevant parties about the object under study. Location of the research conducted at the police resort Yogyakarta. Data analysis method used is qualitative analysis. The method of analysis is done by understanding and arranging the data gathered systematically so as to obtain a real description of the object studied. The reasoning process used is the inductive method. Police role Yogyakarta carry out policing prostitution in the city of Yogyakarta is in cooperation with the office of Government Order Yogyakarta City, Civil Service Police Unit, conducted a sweeping, track the

places where prostitutes often gather. In addition, the police did arrest the prostitutes, were taken to the police station for questioning. Police also gives an understanding, education or work experience provision that the prostitutes are no longer commit sexual misconduct. Yogyakarta City Police constraints encountered in the curb prostitution is leakage of information about the policing of prostitution to be carried out so that the implementation of the curbing police failed.

Keywords: Police Department, Controlling, Prostitution.

## **B. Latar Belakang**

Secara sosiologis kemajuan atau pertumbuhan suatu kota akan dibarengi dengan munculnya berbagai masalah sosial di kota diantaranya keberadaan Pekerja Seks Komersial (PSK). Keberadaan PSK memang dari dulu sudah ada dan tidak bisa dapat dihapus begitu saja karena dengan adanya PSK tersebut masyarakat bisa mencari hiburan dan mencari tempat untuk menghilangkan stress ataupun bosan dalam menghadapi suatu permasalahan dan pekerjaan, maka dari itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Keberadaan PSK di daerah perkotaan adalah konsekuensi logis dari perkembangan kota. Beberapa ahli perkotaan berpendapat adalah mustahil meniadakan PSK di kota. Kondisi ini diperkuat oleh adanya kebijakan pembangunan di Indonesia yang ada prakteknya menyebabkan kaum perempuan terpinggirkan atau

sengaja dipinggirkan pada sektor ekonomi. Banyak jenis pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan oleh perempuan sekarang diambil alih oleh laki-laki, akibatnya kadang untuk mempertahankan hidup perempuan terpaksa menjual diri.

Sejak dulu PSK sudah menjadi akar di dunia ini, sebagian yang melakukan pekerjaan tersebut, karena faktor ekonomi dan frustrasi dengan keadaan yang ada. Pekerjaan ini sudah menjadi lumrah bagi mereka yang melakukannya, bahkan ada sebuah desa yang menjadi sarana dan prasarana mereka untuk beroperasi tanpa ada kendala dari masyarakat setempat, akan tetapi masyarakat tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. pekerjaan tersebut sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat di desa tersebut. Bahkan para pekerja seks komersial itu mendapatkan izin untuk tinggal di desa tersebut dan mendapatkan fasilitas kesehatan secara rutin.<sup>1</sup>

Kota Yogyakarta sebagai salah satu kota pelajar, kota budaya dan wisata kini gencar mengupayakan penertiban PSK tersebut tentu sangat diharapkan peran polisi sebagai pemelihara dan keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi diharapkan bisa mencegah dan menanggulangi tumbuh dan berkembangnya penyakit masyarakat termasuk pelacuran. Salah satu pihak yang diharapkan berperan dalam penertiban PSK ini adalah polisi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Khususnya dalam Pasal 13, 14, dan 15. Dalam

---

<sup>1</sup> [https://www.academia.edu/7346451/MAKALAH\\_PSK](https://www.academia.edu/7346451/MAKALAH_PSK), 9 Februari 2015

Pasal 13 dinyatakan sebagai berikut : Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakkan hukum serta sebagai pengayom masyarakat, dan
3. Memberikan perlindungan juga pelayanan kepada masyarakat.<sup>2</sup>

Sejauh ini keberadaan polisi belum mampu memberikan keamanan dan kenyamanan masyarakat sepenuhnya. Sampai sekarang keberadaan PSK di Kota Yogyakarta masih tetap ada bahkan meningkat. Dalam hal ini POLRI ikut serta bersama-sama dengan SATPOL PP walaupun dalam penertiban PSK sebenarnya yang berwenang adalah SATPOL-PP. POLRI berperan aktif apabila para PSK terlibat dalam kasus kejahatan seperti korban penganiayaan, dan terlibat dalam pemakaian narkoba maka Polisilah yang menangani kasus tersebut bukan lagi SALPOL-PP, jadi keduanya saling melengkapi.

Berdasarkan uraian dan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk kemudian dituangkan dalam skripsi dengan judul “PERAN POLISI DALAM PELAKSANAAN PENERTIBAN PELACURAN DI KOTA YOGYAKARTA”.

---

<sup>2</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI No.2 Th.2002)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm 8

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan seperti di atas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peranan polisi dalam pelaksanaan penertiban Pelacuran di Kota Yogyakarta selama ini?
2. Apa kendala atau hambatan yang dihadapi polisi dalam penertiban Pelacuran di Kota Yogyakarta?

### D. Pembahasan

Prostitusi berasal dari bahasa latin (*pro-stituere* atau *pro-stauree*), yang berarti membiarkan diri berbuat zinah, melakukan persundalan, pencabulan, pergendakan. Orang yang melakukan aktifitas prostitusi disebut Pekerja Seks Komersial (PSK) dikenal pula dengan nama Wanita Tuna Susila (WTS). Tuna Susila, diartikan sebagai kurang beradab karena keroyalan relasi seksualnya, dalam bentuk penyerahan diri pada banyak laki-laki untuk pemuasan seksual dan mendapatkan imbalan jasa atau uang bagi pelayanannya. Tuna susila juga diartikan sebagai salah tingkah, tidak susila atau gagal menyesuaikan diri terhadap norma-norma susila. Pelacur adalah wanita yang tidak pantas kelakuannya dan bisa mendatangkan petaka /celaka dan penyakit, baik kepada orang lain yang bergaul dengan dirinya, maupun kepada diri sendiri.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Kartono, Kartini, 1999, *Patogi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45



Terdapat banyak istilah yang dipakai untuk menyebut pelacur seperti wanita tuna susila pelayanan seks komersial. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan berkaitan dengan Pelacuran. dengan demikian, pelacuran bukan merupakan deliks seks.<sup>4</sup> Moris Ploscowe mengartikan pelacuran (*prostitution*) sebagai “*the discriminate offer of one’s body for hire, for the purpose of sexual intercourse or other secalled*”. Dari pengertian ini jelas dimaksudkan dengan “*fore hire*, menunjuk pada sejumlah uang sebagai transaksi dalam melakukan “*sexual intercourse*”.<sup>5</sup> Hal senada diungkapkan Dirjosisworo yang mengartikan pelacuran sebagai penyerahan badan wanita dengan pembayaran pada orang laki-laki guna pemuasan nafsu seksual orang itu.<sup>6</sup> Pekerja Seks Komersial (PSK) atau wanita tuna susila (WTS) atau wanita tuna susila (WTS) adalah seorang, biasanya perempuan, yang menjual jasanya melakukan hubungan seksual demi mendapatkan uang sebagai imbalannya. Menurut Kartono, prostitusi itu sendiri adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola implus atau dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang (promiskuitas), disertai eksploitasi dan komersialisasi seks.<sup>7</sup>

Lebih lanjut dalam kalangan PSK juga mempunyai tingkatan-

<sup>4</sup> Made Dharma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 101

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.101

<sup>6</sup> Soedjono Dirdjosisworo, 1982, *Patogi Sosial*, Alumni Bandung, hlm 123

<sup>7</sup> <http://dadangsumarnash.blogspot.com/2012/06/danpermasalahan-hukum-di-indonesia.html>



tingkatan operasional diantaranya :

1. Segmen kelas rendah

Dimana PSK tidak terorganisir, tarif pelayanan seks terendah yang ditawarkan, dan biaya beroperasi dikawasan kumuh seperti halnya pasar, kuburan, taman-taman kota dan tempat lain yang sulit dijangkau, bahkan kadang-kadang berbahaya untuk dapat berhubungan dengan para PSK tersebut.

2. Segmen kelas menengah

Dimana dalam hal tarif sudah lebih tinggi dan beberapa menetapkan tarif harga pelayanan yang berlipat ganda jika dibawa keluar untuk di booking semalaman.

3. Segmen kelas atas

Pelanggan ini kebanyakan dari masyarakat dengan penghasilan yang relatif tinggi yang menggunakan night club sebagai ajang pertama untuk mengencani wanita panggilan atau menggunakan kontak khusus hanya untuk menerima pelanggan tersebut.

4. Segmen kelas tertinggi

Kebanyakan mereka dari kalangan artis televisi dan film serta wanita model. Super germo yang mengorganisasikan perdagangan wanita kelas atas ini.

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang terjerumus kedalam dunia kelim ini, seperti dikemukakan oleh Kartini Kartono :

1. Menghindarkan diri dari kesulitan hidup dan mendapatkan kesenangan melalui "jalan pendek". Kurang pengertian, kurang pendidikan, dan buta huruf, sehingga menghalalkan pelacuran.
2. Ada nafsu-nafsu seks yang abnormal, tidak terintegrasi dalam kepribadian, dan keroyalan seks. Histeris dan hyperseks, sehingga tidak merasa puas mengadakan relasi seks dengan satu pria/suami.
3. Tekanan ekonomi, faktor kemiskinan ada pertimbangan-pertimbangan ekonomis untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya khususnya dalam usaha mendapatkan status sosial yang lebih baik.
4. Aspirasi materiil yang tinggi pada diri wanita dan kesenangan ketamakan terhadap pakaian-pakaian indah dan perhiasan mewah. Ingin hidup bermewah mewahan, namun malas bekerja.
5. Kompensasi terhadap perasaan-perasaan inferior, jadi ada adjustment yang negatif terutama sekali terjadi pada masa puber dan adolesens. Ada keinginan untuk melebihi kakak, ibu sendiri, teman puteri, tante-tante atau wanita-wanita mondain lainnya.
6. Rasa melit dan ingin tahu gadis-gadis cilik atau anak-anak puber pada masalah seks, yang kemudian kecebur dalam dunia pelacuran oleh bujukan-bujukan bandit-bandit seks.
7. Anak-anak gadis memberontak terhadap otoritas orang tua yang menekankan banyak tabu dan peraturan seks. Juga memberontak terhadap masyarakat, dan norma-norma susila yang dianggap terlalu mengekang diri anak-anak remaja ini lebih menyukai pola "seks bebas".
8. Pada masa anak-anak pernah melakukan relasi seks, atau suka melakukan hubungan seks sebelum perkawinan (ada pre-marital sex relation) untuk sekedar iseng, atau untuk menikmati "masa indah" di kala muda. Atau, sebagai symbol keberanian dan kegagahan telah menjelajahi dunia seks secara nyata. Selanjutnya gadis-gadis ini terbiasa melakukan banyak relasi seks secara bebas dengan pemuda-pemuda sebaya, lalu terperosoklah mereka ke dalam dunia pelacuran.
9. Gadis-gadis dari daerah Slums (perkampungan-perkampungan melarat dan kotor dengan lingkungan yang immoral, yang sejak kecilnya selalu melihat persenggamaan orang-orang dewasa secara kasar dan terbuka, sehingga terkondisionir mentalnya dengan tindak-tindak asusila. Lalu menggunakan mekanisme promiskuitas/pelacuran untuk mempertahankan hidupnya.
10. Oleh bujuk rayu kaum laki-laki dan para calo terutama yang menjanjikan pekerjaan-pekerjaan terhormat dengan gaji tinggi. Misalnya sebagai

pelayan toko, bintang film, peragawati dan lain-lain. Namun pada akhirnya, gadis-gadis tersebut dengan kejamnya dikebloskan ke dalam bordil-bordil dan rumah-rumah pelacuran.

11. Banyaknya stimulasi seksual dalam bentuk film-film biru, gambar-gambar porno, bacaan cabul, gang-gang anak muda yang mempraktekkan relasi seks, dan lain-lain.
12. Gadis-gadis pelayan toko dan pembantu rumah tangga tunduk dan patuh melayani kebutuhan-kebutuhan seks dari majikannya untuk tetap mempertahankan pekerjaannya.
13. Penundaan perkawinan, jauh sesudah ke matangan biologis, disebabkan oleh pertimbangan-pertimbangan ekonomis dan standar hidup yang tinggi. Lebih suka melacur (kan diri) daripada kawin.
14. Disorganisasi dan disintegrasi dari kehidupan keluarga, broken home, ayah atau ibu lari, kawin lagi atau hidup bersama dengan pathner lain. Sehingga anak gadis merasa sangat sengsara batinnya, tidak bahagia, memberontak, lalu menghibur diri terjun dalam diri dunia pelacuran.
15. Mobilitas dari jabatan atau pekerjaan kaum laki-laki dan tidak sempat membawa keluarganya. Misalnya pekerjaan: pengemudi, tentara, pelaut, pedagang, dan kaum politisi, yang membutuhkan pelepasan bagi ketegangan otot-otot dan syarafnya dengan bermain "perempuan".
16. Adanya ambisi-ambisi besar pada diri wanita untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, dengan jalan yang mudah, tanpa kerja berat; tanpa suatu skill atau keterampilan khusus.
17. Adanya anggapan, bahwa wanita memang dibutuhkan dalam macam-macam permainan cinta, baik sebagai iseng belaka maupun sebagai tujuan-tujuan dagang.
18. Pekerjaan sebagai pelacur tidak membutuhkan keterampilan/skill, tidak memerlukan inteligensi tinggi; mudah dikerjakan asal orang yang bersangkutan memiliki kecantikan, kemudahan dan keberanian. Tidak hanya orang-orang normal, wanita-wanita yang agak lemah ingatan pun bisa melakukan pekerjaan ini.
19. Anak-anak gadis dan wanita-wanita muda yang kecanduan obat bius (hash-hish, ganja, morfin, heroin, candu, likeur/minuman dengan kadar alcohol tinggi, dan lain-lain) banyak menjadi pelacur untuk mendapatkan uang pembeli obat-obatan tersebut.
20. Oleh pengalaman-pengalaman traumatis (luka jiwa) dan shock mental misalnya gagal dalam bercinta atau perkawinan dimadu, ditipu, sehingga muncul kematangan seks yang terlalu dini dan abnormalitas seks. Contoh: seorang gadis cilik yang pernah diperkosa kesuciannya oleh laki-laki, menjadi terlalu cepat matang secara seksual ataupun menjadi patah hati dan penuh dendam kesumat, lalu menerjunkan diri dalam dunia pelacuran.

21. Ajakan teman-teman sekampung / sekota yang sudah terjun terlebih dahulu dalam dunia pelacuran.
22. Ada kebutuhan seks yang normal, akan tetapi tidak dipuaskan oleh pihak suami. Misalnya karena suami impoten, lama menderita sakit, banyak isteri-isteri lainnya sehingga sang suami jarang mendatangi istri yang bersangkutan, lama bertugas ditempat jauh, dan lain-lain.<sup>8</sup>

Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Daerah Istimewa setingkat provinsi di Indonesia yang merupakan peleburan Negara Kesultanan Yogyakarta dan Negara Kadipaten Paku Alaman. Daerah Istimewa Yogyakarta yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa bagian tengah, dan berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Samudera Hindia. Daerah Istimewa yang memiliki luas 3.185,80 km<sup>2</sup> ini terdiri atas satu kota, dan empat kabupaten, yang terbagi lagi menjadi 78 kecamatan, dan 438 desa/kelurahan. Menurut sensus penduduk 2010 memiliki jumlah penduduk 3.452.390 jiwa dengan proporsi 1.705.404 laki-laki, dan 1.746.986 perempuan, serta memiliki kepadatan penduduk sebesar 1.084 jiwa per km<sup>2</sup>.<sup>9</sup>

Kota Yogyakarta termasuk salah satu daerah propinsi istimewa yang dewasa ini lagi gencar memasyarakatkan upaya penertiban PSK, sesuai dengan karakter permasalahan yang multidimensional, lintas sector dan ruang, maka penanganan PSK di Kota Yogyakarta baik dalam tataran konsep maupun operasional akan dilakukan secara komprehensif, lintas sector dan proporsional. Model penanganan ini diharapkan permasalahan di kota

---

<sup>8</sup> Kartono, Kartini, 1999, *Patogi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 60.

<sup>9</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah\\_Istimewa\\_Yogyakarta](http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta), Jumat 18 April 2015 pukul 19.03.WIB

Yogyakarta dapat direduksi dapat direduksi pada tingkatan seminimal mungkin, berkesinambungan dan berkelanjutan.

Kepolisian merupakan lembaga pemerintah yang teroganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Lembaga ini diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang meliputi pemeliharaan ketertiban dan keamanan masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.<sup>10</sup> Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak AKP. Joko.Hero Agustino,S.pd. selaku Kanit Turjawali Satuan Sabhara Polresta Yogyakarta menjelaskan, bahwa unit kerja Sabhara Polresta Yogyakarta dalam penanganan dan penertiban permasalahan Pelacuran ini berperan yaitu:

1. Pertama, melakukan razia atau operasi pekerja seks komersial. Langkah pertama yang dilakukan oleh polisi dalam hal ini adalah menangkap semua pelaku eksploitasi seks komersial baik PSK maupun germo serta pemilik tempat yang digunakan untuk praktek pelacuran yang tidak terkontrol, baik hotel, café, pub dan sebagainya. Baik PSK maupun yang lainnya ini akan ditangkap untuk diadili dan mendapat pembinaan sehingga tidak kembali menjajakan diri tetapi kembali ke masyarakat dan hidup secara normal sesuai peraturan yang ada dan norma-norma yang ada

---

<sup>10</sup> Sadjjono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam hukum administrasi*, Laks Bang Presindo, Yogyakarta, hlm. 6

dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan razia ini Unit Kerja Teknis Sabhara dan Bhabinkamtibnas Polresta Yogyakarta bekerja sama dengan instansi yang terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Ketertiban Pemkot Yogyakarta, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP).

2. Kedua, melakukan rehabilitasi dan memberikan pembinaan-pembinaan, penyuluhan-penyuluhan agar PSK dapat kembali ke tengah masyarakat dan tidak melakukan kegiatan pelacuran lagi. Setiap PSK yang ditangkap akan dimintai keterangan, diadili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu PSK akan diberikan pembinaan baik mental ataupun keterampilan. Pembinaan mental dimaksudkan agar PSK menyadari kalau perbuatannya selama ini salah dan tidak akan mengulangnya lagi. Mereka juga dikuatkan secara mental agar siap untuk kembali ke tengah masyarakat. Mereka juga diberikan pelatihan berbagai keterampilan dan bantuan modal untuk beralih profesi.
3. Ketiga, untuk setiap PSK yang telah dibina akan dikembalikan ke dalam masyarakat. Selama mereka mandiri akan terus didampingi agar mereka bisa mandiri.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak AKP. Joko. Hero Agustino,S.pd menjelaskan polisilah yang selama ini mengambil keputusan mau diapakan PSK yang ditangkap tersebut. Beberapa kebijakan yang ditempuh oleh polisi dalam mengatasi PSK tersebut, antara lain:



1. Bagi PSK yang baru pertama kali terkena razia, tindakan yang dapat diambil antara lain:
  - a. Membuat surat pernyataan yang isinya tidak akan mengulangi kembali kegiatan tersebut.
  - b. Dipulangkan ke daerah asal atau dikembalikan kepada keluarga untuk mendapatkan pembinaan dari keluarga.
2. Bagi PSK yang lebih dari satu kali terjaring razia, dapat diambil tindakan antara lain:
  - a. Diserahkan ke Panti Karya Wanita “Wanita Utama” untuk mendapatkan pendidikan keterampilan selama 6 bulan.
  - b. Diserahkan ke aparat penegak hukum untuk diproses melalui Pengadilan Negeri.
  - c. Bilamana ada kekeliruan dalam penjaringan/permohonan pelepasan dari keluarga yang terkena razia lebih dari 4 kali, harus melalui proses:
    - 1) Dari pihak keluarga mengajukan permohonan secara tertulis kepada tim dengan disertai bukti-bukti pendukung antara lain Kartu Keluarga (KK), Fotocopy surat nikah dan mengisi surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Tim Pelaksana yang selanjutnya dilegalisir oleh Kepala Desa setempat.
    - 2) Pelepasan bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan Ketua Tim Pelaksana.



Bapak AKP. Joko.Hero Agustino,S.pd menjelaskan kendala-kendala / hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Polresta Yogyakarta antara lain sebagai berikut :

1. Polisi kurang sungguh-sungguh dalam melakukan penertiban
2. PSK sudah mengetahui kalau akan adanya penertiban dan penjarangan oleh pihak polisi karena adanya keterlibatan polisi di dalamnya.
3. Kurangnya informasi yang transparan atau keterbukaan dari masyarakat setempat yang memfasilitasi tempat terjadinya kegiatan pelacuran.

#### **E. Kesimpulan**

1. Peran polisi Resort Kota Yogyakarta dalam melakukan Pelaksanaan Penertiban Pelacuran di Yogyakarta

Polisi Resort Kota Yogyakarta sudah melakukan penertiban pelacuran di Yogyakarta, antara lain:

- a. Polisi bekerja sama dengan Dinas Pemerintahan Kota Yogyakarta dalam melakukan penertiban dengan cara mencari dan menemukan lokasi di mana para PSK sering berkumpul.
- b. Polisi melakukan penangkapan PSK guna dimintai keterangan dan di proses secara hukum.

- c. Polisi memberikan pendidikan, pelajaran, ataupun bekal pengalaman kerja bagi PSK agar tidak melakukan tindakan pelacuran.
2. Kendala polisi resort kota Yogyakarta dalam penertiban pelacuran di kota Yogyakarta.

Kendala-kendala yang dialami polisi resort kota Yogyakarta, antara lain :

- a. Polisi kurang sungguh-sungguh dalam melakukan penertiban
- b. PSK sudah mengetahui kalau akan adanya penertiban dan penjarangan oleh pihak polisi karena adanya keterlibatan polisi di dalamnya.
- c. Kurangnya informasi yang transparan atau keterbukaan dari masyarakat setempat yang memfasilitasi tempat terjadinya kegiatan pelacuran.

## DAFTAR PUSTAKA

### **BUKU**

- Kartono, Kartini, 1999, *Patogi Sosial*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Made Dharma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Kepolisian Negara (UU RI No.2 Th.2002)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungannya dalam hukum administrasi*, Laks Bang Presindo, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1982, *Patogi Sosial*, Alumni Bandung.

### **WEBSITE**

- [https://www.academia.edu/7346451/MAKALAH\\_PSK](https://www.academia.edu/7346451/MAKALAH_PSK),
- <http://www.dadangsumarnash.blogspot.com/2012/06/danpermasalahan-hukum-di-indonesia.html>
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah\\_Istimewa\\_Yogyakarta](http://id.wikipedia.org/wiki/Daerah_Istimewa_Yogyakarta)